

Membangun Generasi Tangguh Melalui Pembelajaran IPS Terintegrasi Isu Kesetaraan Gender

Azril Azifambayunasti

Universitas Sebelas Maret, Surakarta
azrilazifa@student.uns.ac.id

Article History

received 1/12/2021

revised 8/12/2021

accepted 15/12/2021

Abstract

Build a strong generation in the midst of the rapid flow of information and communication technology development requires not only the ability to think critically and creatively, but also good synergy within the scope of the generation itself without any gender bias. This study aims to analyze the integration of gender equality issues in social studies learning as an effort to build a resilient generation. Through a literature study, this paper seeks to describe a portrait of gender equality in Indonesia and the importance of this issue to be integrated into social studies learning. Thus, the result is that gender bias is still found in many sectors, so the struggle for gender equality still has a long way to go. Therefore, social studies learning becomes a formal means to voice the importance of gender equality, a reality that must be realized in order to optimize the birth of a resilient and golden generation of Indonesia in the future.

Keywords: Gender, Learning, Social Studies, Generation

Abstrak

Membangun generasi yang tangguh di tengah derasnya arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, tetapi juga sinergi yang baik dalam lingkup generasi itu sendiri tanpa adanya bias gender. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi isu kesetaraan gender dalam pembelajaran IPS sebagai upaya membangun generasi tangguh. Melalui studi pustaka, kajian ini berusaha memaparkan potret kesetaraan gender di Indonesia dan pentingnya isu tersebut untuk diintegrasikan ke dalam pembelajaran IPS. Dengan demikian, diperoleh hasil bahwa bias gender masih banyak ditemui di berbagai sektor, sehingga perjuangan akan kesetaraan gender masih harus melalui jalan yang panjang. Oleh karena itu, pembelajaran IPS menjadi sarana formal untuk menyuarakan pentingnya kesetaraan gender, sebuah realita yang harus diwujudkan guna mengoptimalkan lahirnya generasi tangguh dan generasi emas Indonesia di masa depan.

Kata Kunci: Gender, Pembelajaran, IPS, Generasi

Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series
<https://jurnal.uns.ac.id/shes>

p-ISSN 2620-9284
e-ISSN 2620-9292



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah menghadirkan era digital, yang mana hal tersebut sudah pasti menuntut generasi penggeraknya untuk menyesuaikan diri melalui berbagai cara. Oleh karena itu, generasi milenial dan generasi Z dituntut untuk menjadi generasi tangguh yang adaptif dengan berbagai kecakapan sebagai bekal menghadapi dunia yang terus bergerak maju. Seperti yang dikatakan Herman (6 April 2021) dalam laman Beritasatu.com, bahwa generasi milenial dan generasi Z saat ini benar-benar dituntut untuk menjadi tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul, tentunya dengan berbagai cara. Lebih lanjut, Herman mengungkapkan bahwa menurut Alamanda Shantika Santoso dalam acara *Next Gen Summit 2021*, imajinasi dan *curiosity*, adaptasi dan *agility*, kemampuan berpikir inovatif dan kreatif, kemampuan memecahkan masalah, *decision-making skill*, kemampuan berpikir rasional atau kritis, serta kolaborasi sangat diperlukan untuk menjadi generasi tangguh di era ini. Kemampuan-kemampuan itu akan menjadi pegangan utama dan *survival skill* generasi tangguh sebagai penggerak era digital yang serba maju.

Pemaparan terkait tuntutan menjadi generasi tangguh juga sejalan dengan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dalam *Indonesia Outlook 2021* yang digagas Tempo pada bulan Desember 2020 lalu. Pada kesempatan tersebut, Nadiem menjelaskan bahwa tantangan zaman tidak akan pernah berhenti, melainkan akan terus berakselerasi. Generasi yang tangguh harus mau belajar dari kegagalan dan kesulitan. Selain itu, sesuai dengan kerangka kerja Kemendikbud untuk menyiapkan generasi muda melalui Profil Pelajar Pancasila, ditekankan bahwa generasi yang tangguh perlu memaknai Ketuhanan Yang Maha Esa, keberagaman, bergotong royong, kreatif, inovatif dan adaptif, berpikir kritis untuk memecahkan masalah, serta mandiri (Tempo.co, 11 Desember 2020). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa membentuk dan membangun generasi tangguh merupakan tugas yang *urgent* demi menghadapi tuntutan perkembangan zaman. Salah satu sektor yang mengemban tugas tersebut adalah sektor pendidikan.

Dilansir dari laman Tempo.co (11 Desember 2020), menyiapkan generasi muda yang tangguh tentu menjadi tanggung jawab sektor pendidikan, apalagi mengingat penduduk usia muda yang saat ini berjumlah sekitar 64,19 juta atau 24% dari total populasi Indonesia. Angka tersebut telah banyak diprediksi mengalami peningkatan pada tahun 2030 menjadi 71%. Oleh karena itu lah Indonesia disebut-sebut tengah menyongsong generasi emas pada 2045 mendatang, karena kunci keberhasilan pembangunan terletak pada kesuksesan dalam memanfaatkan bonus demografi tersebut. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, kunci utama dari pembentukan generasi tangguh ini ada pada kemampuan kolaborasi. Masing-masing individu dapat dengan mudah mengasah berbagai kemampuan seperti berpikir kritis, kreatif, dan imajinatif, tetapi kemampuan tersebut tidak akan mampu mewujudkan sebuah tujuan besar tanpa adanya kolaborasi.

Faktanya, dalam mewujudkan kolaborasi yang seharusnya menjadi jalan utama bagi generasi tangguh untuk menghadapi tantangan kemajuan zaman, masih terdapat banyak rintangan, salah satunya yaitu adanya bias gender. Bias gender jelas akan menghambat sinergi dari generasi itu sendiri untuk terus berkembang maju, karena kesempatan yang ada tidak merata. Mengutip pernyataan Pelaksana tugas Kepala BKKBN, Fasli Jalal dalam laman Republika.co.id (Sasmita, 3 Februari 2015), stereotip terhadap perempuan dalam dunia kerja masih begitu dominan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih dominannya diksriminasi dalam hal upah, kesempatan kerja, jenis pekerjaan, kesempatan karir, sistem perlindungan dan sistem perlindungan kesehatan. Lebih lanjut, Kirnandita (16 Maret 2017) dalam laman Tirto.id menyatakan bahwa bias gender dalam dunia kerja disebabkan adanya seksisme yang telah mengakar, yang

ditandai dengan adanya stereotip gender. Salah satu contohnya adalah anggapan bahwa perempuan tidak bisa mengerjakan hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki.

Dalam laman *The Conversation* (18 Maret 2020), dijelaskan bahwa berdasarkan data yang dihimpun oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada tahun 2018, diketahui bahwa hanya setengah dari populasi perempuan Indonesia yang memiliki pekerjaan, dan jumlah tersebut tidak pernah bertambah. Sementara itu, pada laki-laki, tingkat ketenagakerjaannya mencapai hampir 80% populasi. Tidak hanya itu, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) UGM (14 Januari 2020) memaparkan bahwa gap upah antar gender di Indonesia masih tinggi berdasarkan *Global Gender Gap Report*. Kemudian, sejak pemilu 1999-2014, jumlah keanggotaan perempuan di DPR RI belum mencapai angka 30% meskipun syarat keterwakilan perempuan sudah diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa berdasarkan Survei Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemendikbud pada tahun 2013, persentase pengajar perempuan di perguruan tinggi sebesar 40,58%, sedangkan pengajar laki-laki sebesar 59,42%. Sangat disayangkan lagi, bias gender juga masih ditemukan dalam proses pembelajaran di dunia pendidikan, sebagaimana dilansir dari *The Conversation* (19 Maret 2020) dimana riset yang mereka lakukan dan dipublikasikan dalam Jurnal *PLOS ONE* menunjukkan bahwa bias gender masih ada pada buku pelajaran di Indonesia.

Pemaparan tersebut rasanya sudah lebih dari cukup untuk menjadikan persoalan gender sebagai isu penting yang harus segera ditangani, apalagi jika negeri ini benar-benar bertekad untuk mempersiapkan dan membangun generasi yang tangguh. Oleh karena itu, pendidikan gender sangat perlu untuk dikembangkan sejak dini supaya pemahaman dan *awareness* terhadap persoalan gender di Indonesia menjadi lebih baik. Pendidikan gender dapat dilakukan melalui pembelajaran formal dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Isu kesetaraan gender dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum IPS tingkat SMP/MTs. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan memaparkan konsep dan relasi gender di Indonesia, pembelajaran IPS, dan menganalisis integrasi isu kesetaraan gender ke dalam kurikulum pembelajaran IPS. Dengan demikian, bias gender diharapkan dapat benar-benar ditekan, sehingga generasi yang dibentuk sebagai generasi tangguh ini dapat berkolaborasi dan bersinergi secara optimal.

METODE

Pembahasan ini dikaji menggunakan metode studi pustaka. Metode tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber pustaka yang telah tersedia untuk memperoleh data yang diperlukan. Menurut Zed (2004:4-5), metode studi pustaka mempunyai empat ciri, antara lain: (1) peneliti berhadapan langsung dengan teks; (2) data pustaka bersifat siap pakai; (3) data pustaka umumnya merupakan sumber sekunder; dan (4) kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu. Dalam pembahasan ini, pustaka yang digunakan adalah buku, website atau laman berita, dan artikel jurnal terkait isu kesetaraan gender di Indonesia, pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan generasi tangguh Indonesia. Selain itu, pembahasan ini juga menggunakan sumber berupa dokumen silabus mata pelajaran IPS kelas VII tingkat SMP/MTs untuk mencari relevansi antara isu sosial yang hendak diintegrasikan dengan kurikulum pembelajaran IPS tersebut. Setelah mengumpulkan pustaka sesuai dengan kebutuhan tema, penulis kemudian membaca dan menuliskan pernyataan-pernyataan yang dianggap dapat membangun narasi sesuai dengan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Relasi Gender di Indonesia

World Health Organization atau WHO (<https://www.who.int/health-topics/gender>) mendefinisikan gender sebagai karakteristik yang melekat pada perempuan dan laki-

laki, yang mana karakteristik tersebut bukan sesuatu yang alamiah, melainkan muncul dari suatu konstruksi sosial. Gender juga merujuk pada perilaku dan peran yang diasosiasikan dengan jenis kelamin. Sebagai contoh, peran perempuan adalah di ranah domestik, sedangkan laki-laki lebih fleksibel karena menjadi penopang ekonomi keluarga. Senada dengan penjelasan tersebut, Putry (2016:165) juga memaparkan bahwa gender adalah sesuatu yang membedakan banyak hal antara perempuan dan laki-laki berdasarkan konstruksi sosial dan budaya. Kemudian, menurut Pryzgodna dan Chrisler (2000:554), gender pada umumnya merujuk pada karakteristik perilaku, sosial, dan psikologis laki-laki dan perempuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata gender diartikan sebagai jenis kelamin, tetapi sesungguhnya dua istilah tersebut tidak lah sama. Seperti yang dikatakan Byrke (1986:90) bahwa pemahaman akan istilah gender seharusnya dibedakan dengan jenis kelamin. Hal tersebut disebabkan karena gender adalah hasil dari konstruksi sosial, sementara jenis kelamin adalah sesuatu yang membedakan manusia secara biologis. West dan Zimmerman (1987:125) juga membedakan gender dengan jenis kelamin, dimana gender adalah sesuatu yang dikonstruksi secara psikologis, kultural, dan sosial, sedangkan jenis kelamin adalah bawaan biologis yang berkaitan dengan anatomi, hormon, dan fisiologi.

Pada awal pembahasan bab *Subjects of Sex/Gender/Desire*, Butler (1990:3) mengutip pernyataan Simone de Beauvoir, “*one is not born a woman, but rather becomes one*”. Ungkapan yang cukup tepat untuk menggambarkan bagaimana menjadi seorang perempuan dan laki-laki lebih banyak dibentuk dan diatur oleh sosial dan kultur masyarakat. Lebih lanjut, Butler (1990:9-10) mengungkapkan perbedaan jenis kelamin dan gender memberikan argumen bahwa apa pun yang tampaknya dimiliki oleh jenis kelamin, gender tetap sesuatu yang dikonstruksi secara kultural. Ia bukan jenis kelamin dan juga bukan hasil kausal dari jenis kelamin tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa gender adalah konstruk sosial kultural masyarakat tentang apa yang harus dimiliki dan dilakukan oleh individu berdasarkan jenis kelaminnya. Santrock (2003:365) juga menyederhanakan gender sebagai sesuatu yang mengacu pada dimensi sosial budaya seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan jenis kelamin mengacu pada dimensi biologis. Namun di sisi lain, Penelope dan Sally (2003:1) menyatakan bahwa gender telah tertanam begitu kuat dalam institusi, tindakan, keyakinan, dan keinginan individu, sehingga ia kemudian tampak alamiah. Kaburnya fakta bahwa gender adalah konstruksi sosial kultural masyarakat yang sesungguhnya dapat berubah kemudian menyebabkan terjadinya bias dalam relasi gender antara perempuan dan laki-laki di berbagai sektor.

Bias gender muncul ketika perempuan dan laki-laki mendapatkan penilaian yang berbeda, yang mana penilaian tersebut tidak dapat dijelaskan secara obyektif (Mengel, dkk., 2017:1). Bias gender kemudian memunculkan stereotip gender, seperti anggapan bahwa salah satu gender lebih inferior dan tidak mungkin untuk disetarakan. Stereotip tersebut pada akhirnya juga mendorong tingginya diskriminasi gender. Secara umum, perempuan distereotipkan bersifat komunal, mendukung, dan mengasuh, sedangkan laki-laki adalah agen yang mandiri dan mampu memimpin (Sullivan, dkk., 2018:2). Stereotip gender semacam itu jelas memosisikan perempuan di bawah laki-laki dalam sistem masyarakat. Kesempatan yang ada menjadi tidak seimbang dan ruang gerak perempuan dalam masyarakat pada akhirnya sangat terbatas. Namun ketika beberapa pihak berusaha mencoba menyetarakan gender, dimensi sosial kultural yang melekat pada laki-laki dan perempuan, ada sebuah hambatan besar yang terlanjur mengakar, seperti yang dikatakan Sullivan, dkk. (2018:1) bahwa upaya yang bertujuan untuk mengurangi bias gender sering menghadapi penolakan dari budaya yang lebih luas.

Perbedaan sifat di antara perempuan dan laki-laki seolah telah diyakini sebagai sebuah kodrat dan terus disosialisasikan melalui legitimasi simbolik yang dilakukan oleh negara dan pusat-pusat sosial kultural (Abdullah, dkk., 2001:46). Oleh karena itu, relasi gender menjadi bias, dan bias gender tidak jarang menjadikan perempuan dan

laki-laki menghadapi serangan ketika mereka melanggar stereotip gender yang telah dilanggengkan itu. Sebagai contoh, perempuan akan dianggap tidak pantas ketika menginginkan jabatan politik, mengekspresikan kemarahan, atau bersaing untuk peran manajerial. Di sisi lain, laki-laki yang melanggar stereotip gender juga menghadapi reaksi yang sama, seperti ketika mereka bekerja di pendidikan dasar awal, meminta cuti keluarga dari pekerjaan, dan berperilaku sopan ketika wawancara kerja (Sullivan, dkk., 2018:2). Realita semacam itu tentu masih banyak ditemui di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Hampir di seluruh sektor, fenomena bias gender masih banyak dijumpai. Bahkan menurut Purnamasari (13 Oktober 2021) dalam laman Kompas.com, Indonesia berada di peringkat 101 dari 156 berdasarkan *Gender Gap Report 2021*, yang mana kesenjangan gender tersebut diukur melalui empat indikator yakni partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik.

Fundrika dan Varwati (8 Juni 2021) dalam laman Suara.com juga memaparkan Data Kementerian PPPA yang menunjukkan bahwa tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki pada tahun 2020 sebesar 75,98, sedangkan perempuan baru 69,19. Dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), perempuan juga masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Mengutip pernyataan dari Menteri PPPA, kesetaraan gender yang diimpikan belum dapat sepenuhnya tercapai hingga saat ini karena diskriminasi, stigmatisasi, stereotip, bahkan kekerasan masih menjadi momok bagi perempuan. Selain itu, pada sektor ekonomi, berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh tertinggal dari laki-laki. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan baru 53,13%, sedangkan laki-laki telah mencapai 82,41%. Selain itu, Chotim (2020:77) juga menyebutkan bahwa laki-laki yang terlibat di sektor formal berjumlah sekitar 87%, sedangkan perempuan hanya 11%. Bahkan terkait dengan upah, BPS pada tahun 2019 mencatat kesenjangan antar gender semakin lebar, dimana upah untuk pekerja laki-laki lebih tinggi daripada perempuan (Jayani, 11 Oktober 2019). Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa dengan produktivitas yang sama, pekerja laki-laki dan perempuan bisa mendapatkan upah yang berbeda (Laili & Damayanti, 2018:2).

Pada sektor pendidikan, sebagaimana dilansir dari *The Conversation* (19 Maret 2020), proporsi perempuan dan laki-laki yang mengenyam pendidikan dasar dan menengah telah dapat dikatakan seimbang. Namun, dalam riset yang dipublikasikan di Jurnal *PLOS ONE* menunjukkan bias gender masih ada pada buku pelajaran sekolah di Indonesia, salah satu contohnya yaitu buku mata pelajaran Bahasa Inggris untuk kelas IX SMP sederajat yang menggambarkan karakter laki-laki dengan jenis pekerjaan yang lebih beragam dan maskulin. Sementara itu, karakter perempuan digambarkan memiliki pekerjaan yang cenderung lebih rendah, seperti penyanyi atau penari. Juliana, dkk. (2019:26-27) juga memaparkan penelitiannya di kelas XI MAN 1 Buleleng yang menunjukkan adanya bias gender dalam pembelajaran Sosiologi, mulai dari RPP yang hanya merujuk kata “siswa” tanpa “siswi”, perhatian guru yang lebih banyak kepada murid laki-laki, stereotip bahwa murid laki-laki tidak rajin mengerjakan tugas yang diberikan guru, hingga buku teks yang lebih banyak menampilkan gambar laki-laki dibandingkan perempuan. Ada pula penelitian Murfi (2014:267) yang menunjukkan bahwa bias gender lagi-lagi ditemukan dalam buku teks Pendidikan Agama Islam dan Kristen. Ia menyatakan bahwa buku teks Pendidikan Agama Islam dan Kristen yang dipelajari oleh siswa saat ini hanya sedikit memuat nilai norma gender.

Dalam ranah hukum, Harahap (2003:96) mengemukakan adanya bias gender terutama dalam konteks hukum positif atau hukum tertulis. Ia memaparkan beberapa undang-undang tentang perkawinan yang secara tersurat menyatakan perempuan atau istri sebagai pengatur urusan rumah tangga. Ada pula undang-undang tentang pemerkosaan yang merujuk pada pengertian bahwa setiap pemerkosa pasti laki-laki,

padahal perempuan pun bisa menjadi pelaku. Kemudian, undang-undang tentang larangan aborsi yang seolah menunjukkan bahwa perempuan tidak punya otonomi atas tubuhnya sendiri, serta undang-undang tentang pengurusan harta rumah tangga yang lebih banyak memihak laki-laki atau suami. Tidak hanya berhenti sampai di situ, bias gender juga ditemukan di media massa, seperti yang dikatakan Haryati (2012:42) bahwa secara tidak langsung media massa telah berperan dalam mendefinisikan realita bias gender dalam masyarakat. Media massa mungkin tidak secara langsung juga melahirkan ketidaksetaraan gender, tetapi ia memperkuat, melestarikan, bahkan memperburuk ketidakadilan, terutama terhadap perempuan. Penggambaran yang dilakukan oleh media massa selalu mengarah pada dominasi laki-laki. Laki-laki lebih sering ditampilkan sebagai sosok yang kuat, berkuasa, dan mandiri, sedangkan perempuan ditampilkan sebagai sosok lemah yang sangat bergantung pada laki-laki. Sebuah penggambaran yang tidak banyak menyimpang dari gagasan tradisional patriarki.

Dewasa ini, relasi dan kesetaraan gender pun belum lebih baik, apalagi di tengah kondisi masyarakat yang dilanda pandemi global *Covid-19*. Dalam laman Suara.com, Fundrika dan Varwati (8 Juni 2021) menjelaskan bahwa perempuan pada umumnya mengalami kesulitan dalam memulai, mempertahankan, dan mengembangkan usaha jika dibandingkan dengan laki-laki. Salah satu kesulitan tersebut adalah terbatasnya akses modal dan tingginya beban pekerjaan tidak berbayar, terlebih selama pandemi *Covid-19*. Dalam laman Sinarpaginews.com (18 September 2021) disebutkan pula bahwa perempuan lebih banyak bekerja di sektor-sektor yang paling terpuak oleh kebijakan *lockdown* dan di sisi lain, beban domestik mereka semakin bertambah karena penutupan sekolah. Lebih lanjut, Iswara (24 November 2020) memaparkan laporan *UN Women* dimana 19% perempuan Indonesia mengalami peningkatan intensitas pekerjaan rumah tangga tak terbayar. Banyaknya beban pekerjaan rumah tangga dan berkurangnya pendapatan keluarga pada akhirnya membuat perempuan rentan menjadi korban kekerasan. Realita tersebut menunjukkan betapa pandemi *Covid-19* di Indonesia semakin memperlebar kesenjangan gender yang merugikan perempuan.

Potret relasi gender di Indonesia yang begitu bias dan menunjukkan kesenjangan di berbagai sektor tentu tidak dapat dibiarkan hanya sebagai cerita pilu sepanjang sejarah. Berapa banyak potensi para perempuan di negeri ini yang tenggelam karena tingginya bias dan stereotip gender. Oleh karena itu, kesetaraan gender kemudian menjadi isu yang sangat penting dan krusial untuk senantiasa diperjuangkan, terutama melalui pendidikan dan proses pembelajaran secara formal. Dengan demikian, pembangunan generasi tangguh diharapkan dapat lebih optimal.

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Istilah pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS menurut Daldjoeni (1981:6) merupakan terjemahan dari *Social Studies* yang umum diterapkan dalam pendidikan dasar dan lanjutan di Amerika Serikat. Somantri (2001:74) kemudian menyatakan bahwa IPS adalah penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara dan disiplin ilmu lainnya secara ilmiah untuk tujuan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah. Dalam laman *National Council for The Social Studies* atau NCSS (<https://www.socialstudies.org/about>), pendidikan IPS atau *Social Studies* didefinisikan sebagai berikut.

Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural sciences. The primary purpose of social

studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world.

Pendidikan IPS merupakan studi terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora guna mempromosikan kompetensi kewarganegaraan. Dalam program sekolah, IPS menyediakan studi terkoordinasi dan sistematis yang mengacu pada disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi, serta konten yang sesuai dari humaniora, matematika, dan ilmu alam. Tujuan utama dari Pendidikan IPS adalah membantu generasi muda mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang terinformasi dan beralasan guna kepentingan publik sebagai warga dari masyarakat demokratis yang beragam secara budaya di dunia yang saling interdependen. Berdasarkan definisi Pendidikan IPS atau *Social Studies* yang dikemukakan NCSS tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan IPS mencakup ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan tujuan membentuk generasi muda yang berpengetahuan sosial dan mampu bersosial dengan baik di masyarakat.

Pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek pendidikan daripada transfer konsep. Hal tersebut disebabkan karena dalam pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilannya berdasarkan konsep yang telah mereka miliki (Martoealla, 1987). Dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, IPS merupakan satu bidang studi atau mata pelajaran yang menurut Wijayanti (2015) mempunyai tujuan kurikuler sebagai berikut: (1) membekali siswa dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam masyarakat; (2) membekali siswa dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi di masyarakat; (3) membekali siswa kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan dengan berbagai bidang keilmuan serta berbagai keahlian; (4) membekali siswa dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan keterampilan terhadap lingkungan; dan (5) membekali siswa dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, serta ilmu dan teknologi.

Dalam Kurikulum 2013, pembelajaran IPS dirancang dengan tujuan agar peserta didik menguasai kompetensi-kompetensi sebagai berikut: (1) mensistematisasikan bahan, informasi, dan atau kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna; (2) lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab; dan (3) mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar manusia (Purnomo, dkk., 2016:15). Ruang lingkup IPS sebagai bidang studi dalam kurikulum berdasarkan Permendiknas 2006 tentang Standar Isi adalah sebagai berikut: (1) manusia, tempat, dan lingkungan; (2) waktu, keberlanjutan, dan perubahan; (3) sistem sosial dan budaya; dan (4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Mengingat ruang lingkungannya yang cukup luas, maka penyampaian materi IPS juga harus disesuaikan dengan dengan kemampuan peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Oleh karena itu lah cakupan pembelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar berbeda dengan jenjang pendidikan menengah (Darsono & Karmilasari, 2017:6).

Pada jenjang pendidikan dasar, cakupan pembelajaran IPS hanya terbatas pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah, utamanya gejala dan masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar peserta didik. Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, cakupan pembelajaran IPS diperluas, begitu juga dengan bobot dan keluasan materi yang semakin dipertajam dengan berbagai macam pendekatan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan melatih daya pikir dan daya nalar peserta didik atau mahasiswa secara berkesinambungan. Karena yang dipelajari dalam IPS adalah manusia sebagai anggota masyarakat, maka

materi pembelajaran IPS meliputi ilmu-ilmu sosial yang terkait dengan masyarakat serta gejala, masalah, dan peristiwa sosial (Darsono & Karmilasari, 2017:6-7). Selain itu, Erianjoni (2011:5-6) juga menjelaskan pembelajaran IPS sebagai suatu proses membelajarkan peserta didik untuk memahami masyarakat sebagai suatu kesatuan sistem dengan berbagai permasalahan dan pemecahannya yang memerlukan pendekatan interdisipliner. Pembelajaran IPS dalam hal ini tidak bertujuan membentuk peserta didik menjadi ahli-ahli ilmu sosial, melainkan membentuk sikap hidup yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Lebih lanjut, Erianjoni (2011:6-9) mengemukakan model-model yang umumnya diterapkan dalam pembelajaran IPS, khususnya pembelajaran IPS Terpadu. Model-model tersebut antara lain yaitu: (1) model integrasi berdasarkan potensi utama; (2) model berdasarkan tema; dan (3) model integrasi berdasarkan permasalahan. Di sisi lain, menurut Chapin dan Messick (1996), pendidikan mempunyai tugas utama untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu bertahan di era modern dimana informasi dalam masyarakat dapat berubah dengan begitu cepat. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menolong generasi muda tersebut untuk sukses di masa depannya. Sejak dini, mereka harus dididik untuk siap mengarungi abad ke-21, jangan sampai menunggu abad tersebut menggilas generasi mereka. Dalam kondisi semacam ini, pembelajaran IPS secara khusus mengemban tugas mempersiapkan generasi muda untuk hidup dengan kualitas personal dan sosial guna memahami dunianya. Dengan demikian, pembelajaran IPS sangat perlu untuk dilakukan dengan mengintegrasikan masalah sosial di sekitar atau isu-isu penting dewasa ini, salah satunya yaitu isu terkait kesetaraan gender.

Pembelajaran IPS Terintegrasi Isu Kesetaraan Gender Guna Membangun Generasi Tangguh

Dalam pembahasan sebelumnya, telah dipaparkan mengenai apa itu gender, bagaimana ia kemudian memunculkan bias dan kesenjangan yang bahkan sampai saat ini masih terus dilanggengkan dalam sosial kultural masyarakat Indonesia. Padahal, era ini telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang begitu pesat. Menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman jelas mensyaratkan banyak tuntutan, mulai dari perlunya berbagai macam kecakapan individu hingga kolaborasi yang optimal antar elemen masyarakat. Bias dan kesenjangan gender tentu akan menjadi batu sandungan ketika kita berusaha untuk adaptif dengan cepatnya zaman ini bergerak maju. Terlebih, negeri ini dengan lantang mengatakan berkomitmen untuk mempersiapkan dan membangun generasi yang tangguh serta menyongsong lahirnya generasi emas 24 tahun mendatang. Maka problem terkait kesenjangan gender sudah seharusnya mendapat perhatian serius, salah satunya dengan membawanya ke dalam ruang akademik di sekolah.

Kesetaraan gender di Indonesia sesungguhnya telah tampak sebagai isu krusial yang diperjuangkan, terutama sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Peraturan tersebut bertujuan menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dalam penguasaan terhadap proses pembangunan (<https://www.kempppa.go.id/lib/uploads/list/51014-35739-1.-pengarusutamaan-gender.pdf>). Peraturan tersebut juga mengamanatkan kepada semua lembaga baik pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya (Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia, 27 Agustus 2020). Tidak cukup sampai di situ, isu terkait kesetaraan gender juga sudah seharusnya disosialisasikan, ditanamkan, dan dicari solusi strategis pemecahan permasalahan yang ada di dalamnya melalui proses pembelajaran formal di sekolah. Mengingat isu kesetaraan gender erat kaitannya dengan sosial kultural masyarakat, maka bidang

studi dalam kurikulum di Indonesia yang dapat mengakomodasi pengintegrasian isu kesetaraan gender adalah IPS.

Ketika mengintegrasikan isu kesetaraan gender pada proses pembelajaran IPS, perlu diperhatikan terlebih dahulu elemen penting dalam pembelajaran tersebut, yaitu guru. Dalam hal ini, posisi guru sangat strategis, seperti yang dikatakan Adriana (2009:148) bahwa guru harus berperspektif gender karena ia merupakan ujung tombak pendidikan. Pada akhirnya, akan percuma apabila proses pembelajaran berbicara tentang kesetaraan gender hingga mengintegrasikannya ke dalam buku-buku bacaan atau bahan ajar jika gurunya tidak mendukung. Martanti (2017:79) mengatakan pula bahwa guru adalah pihak yang secara langsung berinteraksi dengan peserta didik, sehingga perannya dirasa cukup penting untuk dapat memahami konsep yang benar tentang gender. Dengan demikian, sebelum isu terkait kesetaraan gender diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran IPS, maka guru juga harus benar-benar mendukung isu tersebut. Jika guru telah berperspektif gender, maka proses penyusunan rancangan kegiatan pembelajaran dan materi ajar yang terintegrasi isu kesetaraan gender akan lebih mudah dan mungkin untuk dilakukan.

Isu kesetaraan gender dapat diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran IPS dengan tema atau Kompetensi Dasar (KD) yang mempunyai keterkaitan. Dengan demikian, isu kesetaraan gender kemudian menjadi sebuah materi yang diajarkan dan didiskusikan di dalam kelas. Berdasarkan analisis dokumen silabus mata pelajaran IPS tingkat SMP/MTs, dapat disimpulkan bahwa materi tentang isu kesetaraan gender berkaitan dengan KD 3.1 Memahami konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. Pada KD tersebut, terdapat pembahasan materi terkait potensi sumber daya manusia yang meliputi jumlah, sebaran, dan komposisi, pertumbuhan, kualitas, serta keragaman etnik. Isu gender jelas berkaitan dengan potensi sumber daya manusia, sehingga ia dapat diintegrasikan ke dalam pembahasan mengenai materi tersebut.

Apabila KD yang relevan telah diperoleh dan materi ajar tentang isu kesetaraan gender telah disusun, lalu bagaimana mengajarkannya? Isu kesetaraan gender dapat diajarkan dalam pembelajaran IPS melalui model integrasi berdasarkan permasalahan. Guru menjadikan isu kesetaraan gender sebagai permasalahan utama dalam kegiatan pembelajaran, dan peserta didik didorong untuk meninjau dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang dijelaskan Erianjoni (2011:9), dimana permasalahan yang menjadi topik utama dalam kegiatan pembelajaran kemudian dianalisis faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang mempengaruhinya. Selain itu, faktor historis, kronologis, dan kausalitas serta perilaku masyarakat terhadap aturan/norma juga perlu untuk ditinjau.

Integrasi isu kesetaraan gender dalam pembelajaran IPS tidak boleh hanya berhenti pada ranah kognitif, karena jika demikian, maka upaya mewujudkan kesetaraan gender melalui pembelajaran hanya akan menjadi hal yang sia-sia. Guru juga perlu dan harus senantiasa telaten mendorong peserta didik untuk terampil berpikir logis dan kritis dalam menghadapi suatu permasalahan yang disajikan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, peserta didik tidak hanya pasif menerima materi yang disampaikan oleh guru, tetapi juga turut menunjukkan keterampilan mereka dalam pemecahan masalah. Selain itu, guru juga sangat perlu dengan jelas memahami konsep gender dan menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender kepada peserta didik. Hal tersebut diharapkan dapat menjadikan mereka paham dan sadar bahwa gender adalah sebuah konstruk sosial kultural masyarakat yang dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman, bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai potensi dan kesempatan yang sama di berbagai sektor, bahwa bias dan stereotip gender yang selama ini berkuasa dalam sistem masyarakat sudah seharusnya diakhiri.

Integrasi isu kesetaraan gender ke dalam pembelajaran IPS ini dilakukan di jenjang pendidikan menengah karena seperti yang disebutkan Darsono dan Karmilasari (2017:7) bahwa pembelajaran IPS di jenjang pendidikan menengah sudah bertujuan melatih daya pikir dan daya nalar secara berkesinambungan. Isu tentang gender bisa saja diintegrasikan dalam pembelajaran IPS di jenjang pendidikan dasar, tetapi tentu dengan penyampaian materi yang lebih sederhana. Oleh karena itu, dalam pembahasan yang lebih kompleks dan menuntut pemecahan masalah, isu kesetaraan gender ini tepat diintegrasikan di jenjang pendidikan menengah. Dengan demikian, peserta didik di usia jenjang pendidikan menengah akan mempunyai bekal yang cukup terkait isu kesetaraan gender untuk nantinya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jika generasi muda telah sejak dini mempunyai bekal yang memadai terkait isu kesetaraan gender, maka bukan tidak mungkin fenomena bias dan stereotip gender dalam masyarakat akan berangsur-angsur runtuh. Perempuan dan laki-laki tidak akan lagi identik dengan label-label yang menghambat mereka untuk berkolaborasi membentuk generasi tangguh yang tengah dibangun di negeri ini.

SIMPULAN

Gender dapat diartikan sebagai karakteristik, perilaku, dan peran yang diasosiasikan dengan laki-laki dan perempuan, yang mana hal tersebut berasal dari konstruk sosial kultural, bukan biologis seperti jenis kelamin. Gender kerap kali memunculkan bias, stereotip yang kemudian menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan akses dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, perempuan seringkali menjadi pihak yang termarginalkan. Di Indonesia sendiri, ketidaksetaraan gender masih sangat banyak ditemukan di berbagai sektor. Pada sektor ekonomi terdapat kesenjangan upah dan rendahnya ketenagakerjaan perempuan di sektor formal, dan di sektor pendidikan pun, proses pembelajaran serta bahan ajar yang digunakan masih cukup bias gender. Pada sektor hukum, masih ada pula beberapa undang-undang yang dinilai menyudutkan perempuan bahkan dan laki-laki. Bahkan di media massa, ketidaksetaraan gender masih begitu subur pula, ditambah dengan pandemi Covid-19 yang semakin memperlebar gender gap antara laki-laki dan perempuan.

Isu kesetaraan gender tentu dapat dikembangkan melalui pembelajaran formal, salah satunya yaitu pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS atau Social Studies merupakan penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara dan disiplin ilmu lainnya untuk tujuan pendidikan. Ia tidak bertujuan membentuk peserta didik menjadi ahli-ahli ilmu sosial, melainkan membentuk sikap hidup yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Model-model yang umumnya diterapkan dalam pembelajaran IPS, khususnya IPS Terpadu antara lain: (1) model integrasi berdasarkan potensi utama; (2) model berdasarkan tema; dan (3) model integrasi berdasarkan permasalahan. Pembelajaran IPS secara khusus mengemban tugas mempersiapkan generasi muda untuk hidup dengan kualitas personal dan sosial guna memahami dunianya.

Mengintegrasikan isu kesetaraan gender pada proses pembelajaran IPS perlu memperhatikan posisi guru terlebih dahulu. Akan percuma apabila proses pembelajaran berbicara tentang kesetaraan gender hingga mengintegrasikannya ke dalam buku-buku bacaan atau bahan ajar jika gurunya tidak berperspektif gender. Berdasarkan analisis dokumen silabus mata pelajaran IPS tingkat SMP/MTs, isu kesetaraan gender dapat diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran IPS dengan KD 3.1 dimana terdapat pembahasan materi terkait potensi sumber daya manusia yang meliputi jumlah, sebaran, dan komposisi, pertumbuhan, kualitas, serta keragaman etnik. Materi tersebut kemudian dapat dikemas ke dalam bahan ajar seperti buku suplemen, handout, atau modul. Langkah lebih baik pula jika bahan ajar tersebut berbasis digital. Kemudian, materi tersebut dapat diajarkan dalam pembelajaran IPS

melalui model integrasi berdasarkan permasalahan. Integrasi isu kesetaraan gender dalam pembelajaran IPS tidak boleh hanya berhenti pada ranah kognitif, tetapi juga harus mencakup ranah afektif dan psikomotorik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. dkk. (2001). Bias Gender Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif. *Populasi*, 12(2), 45–75.
- Adriana, I. (2009). Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan). *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 137-152.
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism And The Subversion of Identity*. New York and London: Routledge.
- Byrke, L. (1986). *Women, Feminism And Biology: The Feminist Challenge*. New York and Brighton: Prentice Hall.
- Chapin, J. R. & Messick, R. G. (1996). *Elementary Social Studies: A Practical Guide*. New York: Longman.
- Chotim, E. E. (2020). Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia: Keinginan dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi Terhadap UKM Cirebon Home Made). *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(1), 70–82.
- Daldjoeni. (1981). *Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Sosial (Buku Pengantar Bagi Mahasiswa dan Guru)*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Darsono & Karmilasari, W. A. (2017). *Sumber Belajar Penunjang PLPG 2017 Kompetensi Profesional Mata Pelajaran: Guru Kelas SD Unit IV: Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Dilema Bias dan Pendidikan Gender pada Anak Usia Dini. (14 Januari 2020). *Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) UGM*, (<https://pssat.ugm.ac.id/id/dilema-bias-dan-pendidikan-gender-pada-anak-usia-dini/>).
- Eckert, P; McConnell-Ginet, S. (2003). *Language And Gender*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Erianjoni. (2011). *Pembelajaran IPS: (Konsepsi, Strategi dan Refleksi)*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Fundrika, B. A. & Varwati, L. (8 Juni 2021). Menteri PPPA: Kesetaraan Gender di Indonesia Masih Belum Sepenuhnya Tercapai. *Suara.com*, (<https://www.suara.com/lifestyle/2021/06/08/113332/menteri-pppa-kesetaraan-gender-di-indonesia-masih-belum-sepenuhnya-tercapai>).
- Gender and Health. (Tanpa Tahun). *World Health Organization*, (<https://www.who.int/health-topics/gender>).
- Harahap, Z. (2003). Menggugat Hukum yang Bias Gender. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(22), 90–101.
- Haryati. (2012). Konstruktivisme Bias Gender Dalam Media Massa. *Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika*, 10(1), 41–55.
- Herman. (6 April 2021). Untuk Milenial dan Gen Z, Ini Syarat Jadi Generasi Tangguh. *Berita Satu*, (<https://www.beritasatu.com/nasional/756133/untuk-milenial-dan-gen-z-ini-syarat-jadi-generasi-tangguh>).
- Implementasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. (27 Agustus 2020). *Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia*, (https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3150).
- Iswara, M. A. (24 November 2020). Bagaimana Kesetaraan Gender di Ujung Tanduk Saat Pandemi Menerjang. *Tirto.id*, (<https://tirto.id/bagaimana-kesetaraan-gender-di-ujung-tanduk-saat-pandemi-menerjang-f7b2>).

- Jayani, D. H. (11 Oktober 2019). Perempuan Indonesia Digaji Lebih Rendah dari Pekerja Laki-laki. *Databoks*, (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/11/kesenjangan-upah-antar-gender-semakin-melebar>).
- Juliana, G. dkk. (2019). Bias Gender Dalam Pendidikan (Studi Kasus Pembelajaran Sosiologi Kelas XI dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi di MAN 1 Buleleng. *e-Journal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha*. 1(1), 23–32.
- Kasus Aice: Dilema Buruh Perempuan di Indonesia dan Pentingnya Kesetaraan Gender di Lingkungan Kerja. (18 Maret 2020). *The Conversation*, (<https://theconversation.com/kasus-aice-dilema-buruh-perempuan-di-indonesia-dan-pentingnya-kesetaraan-gender-di-lingkungan-kerja-133010>).
- Kirandita, P. (16 Maret 2017). Ketika Perempuan Dinomorduakan di Dunia Kerja. *Tirto.id*, (<https://tirto.id/ketika-perempuan-dinomorduakan-di-dunia-kerja-ckPK>).
- Laili, M. H., & Damayanti, A. (2018). Kesenjangan Upah Antargender di Indonesia: Bukti Empiris di Sektor Manufaktur. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 1–21.
- Martanti, F. (2018). Penanaman Konsep Gender Pada Mata Pelajaran Ips Sd. *MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar Dan Keislaman*, 8(1), 78–95.
- Martoella, P. H. (1987). *Social Studies for Elementary School Children, Developing Young Citizens*. New York: McMillan College Publishing Company.
- Mengel, F., dkk. (2017). Gender Bias in Teaching Evaluations. *Journal of the European Economic Association*, 17(2), 535–566.
- Menjadi Milenial Tangguh Hadapi Tantangan. (11 Desember 2020). *Tempo.co*, (<https://nasional.tempo.co/read/1413501/menjadi-milenial-tangguh-hadapi-tantangan>).
- Murfi, A. (2014). Bias Gender dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Kristen. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 267.
- Pandemi Menjadi Faktor Adanya Kesenjangan Gender. (18 September 2021). *Sinarpaginews.com*, (<https://sinarpaginews.com/destinasi/44370/pandemi-menjadi-faktor-adanya-kesenjangan-gender.html>).
- Pengarusutamaan Gender. (19 Juni 2011). *Kertas Kebijakan*, (<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/51014-35739-1.-pengarusutamaan-gender.pdf>).
- Pryzgodna, J. & Chrisler, J. C. (2000). Definitions of Gender and Sex: The Subtleties of Meaning. *Sex Roles*, 43(7/8), 553–569.
- Purnamasari, D. M. (13 Oktober 2021). Menteri PPPA: Indonesia Peringkat 101 Dari 156 Dalam Hal Gender Gap. *Kompas.com*, (<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/13/12391921/menteri-pppa-indonesia-peringkat-101-dari-156-dalam-hal-gender-gap?page=all>).
- Purnomo, A. dkk. (2016). Model Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Pada Materi Kontroversi (Controversy Issues) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Semarang. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 33(1), 13–25.
- Putry, R. (2016). Manifestasi Kesetaraan Gender Di Perguruan Tinggi. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(2), 164–182.
- Riset: Ada Bias Gender Dalam Buku Pelajaran di Indonesia dan Beberapa Negara Mayoritas Muslim Lain. (19 Maret 2020). *The Conversation*, (<https://theconversation.com/riset-ada-bias-gender-dalam-buku-pelajaran-di-indonesia-dan-beberapa-negara-mayoritas-muslim-lain-134143>).
- Santrock, J. W. (2003). *Adolescence (Perkembangan Remaja)*. Erlangga.
- Sasmita, I. (3 Februari 2015). Bias Gender Ketenagakerjaan Perempuan di Indonesia Masih Tinggi. *Republika*,

- (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/03/nj77xl-bias-gender-ketenagakerjaan-perempuan-di-indonesia-masih-tinggi>).
- Somantri, N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PPS-FPIPS UPI dan Remadja Rosda Karya.
- Sullivan, J., dkk. (2018). Backlash against gender stereotype-violating preschool children. *PLoS ONE*, 13(4), 1–24.
- West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). Doing gender and health. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1(2), 125–151.
- Wijayanti, I. (2015). *Studi Kasus Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Bagi Anak Penyandang Masalah Sosial*. Thesis. Lampung: Pascasarjana FKIP Universitas Lampung.